



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 221/HUMAS PMK/VIII/2023

Pemerintah Optimis Tidak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan acara Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK Jakarta, pada Rabu (23/08/2023).

Agenda tersebut sebagai sarana diskusi antara para pemangku kepentingan dengan wartawan terkait strategi dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan untuk menangani berbagai isu prioritas khususnya terkait kemiskinan ekstrem, stunting, dan pendidikan vokasi yang ditangani oleh Kemenko PMK.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyebut ada beberapa strategi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.

Tiga strategi yang diandalkan pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem yakni melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan diikuti dengan berbagai kebijakan afirmatif baik dari sisi refocusing anggaran, perbaikan data dan pen sasaran, serta penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi.

"Dengan pendekatan konvergensi ini, maka dipastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, namun dari beberapa program, sehingga upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan," ungkapnya.

Sejalan dengan itu, dalam laporannya bertajuk Indonesia Poverty Assessment , Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai hasil yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem pada Maret 2023, menjadi 1,12% dari 2,04% Maret 2022 atau turun sekitar 0,92%.

Lebih lanjut, permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi isu prioritas yang harus di selesaikan.

Presiden telah menargetkan prevalensi angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Y. B. Satya Sananugraha berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tersebut.

"Salah satu cara yang kami lakukan dengan mengajak perusahaan tambang yang ada di Indonesia paling tidak CSRnya itu digunakan untuk percepatan penurunan stunting minimal di sekitar wilayah perusahaannya," jelasnya.

Selain itu, penggalakan program Bapak Asuh Anak Stunting bagi ASN dan anggota Forkopimda untuk terlibat membantu pemenuhan gizi anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito mengatakan bahwa sejatinya antara kemiskinan dan pendidikan bagaikan ayam dan telur. Maka dari itu, pemerintah berusaha memotong rantai permasalahan angka kemiskinan melalui jenjang pendidikan.

"Melalui Perpres Revitalisasi Vokasi bapak Presiden berusaha untuk memotong rantai kemiskinan melalui penanganan pengangguran dalam hal ini tidak ingin adanya lulus kejuruan yang nganggur,"

Hal tersebut sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri dalam menciptakan lapangan kerja bagi seluruh lulusan pendidikan di Indonesia.

Maka dari itu, mari kerja bersama hapuskan kemiskinan ekstrem!!!!

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**